

## Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah

Savira Rahmadhea<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang<sup>1</sup>

[savirard12@gmail.com](mailto:savirard12@gmail.com)<sup>1</sup>

Manusrip diterima: 17 September 2025 (Date of abstract/manuscript submission). Revisi diterima: 22 Oktober 2025..

### Abstract:

*This study aims to analyze the effectiveness of education budget utilization in improving the quality and equity of education services in Indonesia. The method used was a literature review, examining various scientific sources for the 2019–2024 period, including books, journals, and government policy documents. The results indicate that despite the substantial allocation of education funds through the School Operational Assistance (BOS) and Special Allocation Fund (DAK) programs, their effectiveness remains limited due to the predominance of use for routine operational needs. The implementation of performance-based budgeting and the Value for Money (VMF) principle has not been optimal, primarily due to low school managerial capacity, delays in fund disbursement, and a lack of transparency and outcome-based evaluation. Schools with participatory planning and the use of digital technologies such as e-budgeting have demonstrated greater effectiveness, particularly in improving teacher competency and learning quality. Therefore, strengthening financial management capacity, implementing a transparent monitoring system, and optimizing the role of the community in budget management are necessary to achieve efficient, accountable education governance oriented toward sustainable improvement in education quality.*

**Keywords:** Budget Effectiveness, Educational Financial Management, School Quality, Transparency.

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan anggaran pendidikan dalam meningkatkan mutu dan pemerataan layanan pendidikan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber ilmiah periode 2019–2024, termasuk buku, jurnal, dan dokumen kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun alokasi dana pendidikan cukup besar melalui program BOS dan DAK, efektivitas pemanfaatannya masih terbatas karena dominasi penggunaan untuk kebutuhan operasional rutin. Implementasi anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) dan prinsip *Value for Money* belum optimal, terutama akibat rendahnya kapasitas manajerial sekolah, keterlambatan penyaluran dana, serta kurangnya transparansi dan evaluasi berbasis hasil belajar. Sekolah dengan perencanaan partisipatif dan penggunaan teknologi digital seperti *e-budgeting* menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih baik, terutama dalam peningkatan kompetensi guru dan mutu pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas manajemen keuangan, penerapan sistem pengawasan transparan, serta optimalisasi peran masyarakat dalam pengelolaan anggaran untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Efektivitas Anggaran, Manajemen Keuangan Pendidikan, Mutu Sekolah, Transparansi.

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam menciptakan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat global. Mutu pendidikan menjadi tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika global, khususnya di era Revolusi Industri 4.0 dan menuju *Society 5.0* (Setiawan & Mulyani, 2021). Dalam konteks ini, alokasi dan pengelolaan anggaran pendidikan memiliki peran strategis sebagai motor penggerak dalam peningkatan mutu sekolah dan lembaga pendidikan secara menyeluruh. Pemerintah Indonesia, melalui kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang



2025 oleh penulis. Artikel ini dikirim untuk dipertimbangkan dalam publikasi di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike CC BY-SA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), menegaskan kewajiban alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui investasi di bidang Pendidikan. Namun demikian, besarnya alokasi dana pendidikan tidak serta-merta menjamin peningkatan mutu pendidikan jika tidak diiringi dengan pengelolaan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Efektivitas penggunaan anggaran pendidikan mengacu pada sejauh mana dana yang dialokasikan mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi program (Astuti & Rahman, 2021). Dalam praktiknya, tantangan yang sering dihadapi meliputi perencanaan anggaran yang kurang tepat sasaran, birokrasi yang panjang, lemahnya sistem *monitoring* dan evaluasi, serta rendahnya kapasitas manajerial di tingkat satuan pendidikan (Hidayat & Susanto, 2020).

Untuk mencapai efektivitas yang optimal, perlu adanya pendekatan berbasis *performance-based budgeting*, di mana penggunaan anggaran dikaitkan langsung dengan capaian kinerja pendidikan, seperti peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum, penyediaan sarana prasarana pembelajaran yang relevan, serta peningkatan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat (Sari & Handayani, 2021). Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan juga menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan mutu Pendidikan. Dengan demikian, efektivitas penggunaan anggaran pendidikan bukan hanya persoalan teknis dalam administrasi keuangan, melainkan merupakan bagian integral dari kebijakan pendidikan nasional yang berorientasi pada mutu dan pemerataan. Pemerintah perlu memperkuat sistem tata kelola keuangan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, misalnya dengan penggunaan sistem *e-budgeting* dan *e-monitoring*, agar proses perencanaan dan pengawasan menjadi lebih transparan, efisien, dan partisipatif (Nasution & Rahayu, 2023). Tanpa pengelolaan yang efektif, bahkan dana pendidikan yang besar pun berpotensi tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional yang berkelanjutan.

Sejumlah penelitian mutakhir setelah tahun 2019 menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pendidikan secara nominal belum selalu sejalan dengan peningkatan mutu sekolah yang signifikan. Salah satu program strategis dalam konteks pendidikan dasar dan menengah



di Indonesia adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang berfungsi sebagai instrumen utama untuk mendukung pembiayaan operasional sekolah guna meningkatkan mutu layanan pendidikan. Namun demikian, efektivitas program BOS sangat bergantung pada tata kelola dan transparansi pengelolaan dana di tingkat sekolah. Studi terbaru mengindikasikan bahwa pengelolaan dana BOS yang efisien dan akuntabel mampu memberikan dampak positif terhadap penyediaan sarana belajar, peningkatan kegiatan ekstrakurikuler, dan perbaikan layanan pendidikan di sekolah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kemampuan sekolah dalam mengelola dana secara profesional, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan prioritas pendidikan.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua elemen fundamental dalam menjamin efektivitas penggunaan anggaran pendidikan. Ketika transparansi tidak terwujud secara optimal, risiko terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan dana publik menjadi lebih tinggi, sehingga dapat menurunkan kualitas capaian pendidikan. Transparansi memungkinkan publik, terutama pemangku kepentingan sekolah, untuk mengawasi setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Menurut Prasetyo dan Nuryani (2020), keterbukaan informasi anggaran berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik serta mendorong efisiensi penggunaan dana pendidikan. Oleh karena itu, penerapan sistem pengawasan berbasis partisipasi masyarakat dan penggunaan instrumen akuntabilitas digital menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang baik. Salah satu dimensi penting dari efektivitas anggaran pendidikan adalah efisiensi, yaitu bagaimana dana digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* terbaik dengan sumber daya yang terbatas. Selain efisiensi, aspek pengawasan dan pengendalian juga berperan besar dalam menjaga akuntabilitas keuangan sekolah. Kepala sekolah dan komite sekolah memiliki tanggung jawab moral serta administratif untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan dan sasaran mutu pendidikan. Penelitian di Madrasah Aliyah Pangandaran memperlihatkan bahwa keterlibatan aktif komite sekolah dalam pengawasan, serta pengendalian oleh kepala sekolah, berdampak positif terhadap efisiensi pembiayaan dan pencegahan penyimpangan dana (Sutrisno, 2021).

Lebih lanjut, evaluasi anggaran menjadi komponen kritis dalam siklus manajemen keuangan pendidikan. Tanpa evaluasi yang sistematis, proses implementasi program pendidikan rentan berjalan tanpa adanya umpan balik yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan sistem. Sejalan dengan temuan Kurniawan dan Sari (2020), evaluasi berkala



terhadap penggunaan anggaran pendidikan berperan penting dalam memastikan kesesuaian antara perencanaan strategis dan hasil yang dicapai di lapangan. Meski demikian, laporan pemerintah menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran pendidikan tidak selalu diikuti dengan peningkatan efektivitas realisasinya. Dalam periode 2015–2019, misalnya, masih terdapat kesenjangan antara alokasi dan realisasi anggaran pendidikan dalam APBN (DPR RI, 2020). Fenomena ini menandakan adanya persoalan dalam aspek implementasi dan distribusi anggaran. Kompleksitas semakin meningkat karena dana pendidikan dialirkan melalui berbagai mekanisme, seperti transfer ke daerah, dana alokasi khusus (DAK), serta pembiayaan program nasional. Tanpa koordinasi lintas lembaga dan sistem *monitoring* yang kuat, efektivitas penggunaan anggaran sulit diwujudkan (Nasution, 2022).

Isu pemerataan dalam distribusi anggaran pendidikan masih menjadi tantangan utama dalam sistem pendidikan Indonesia. Permasalahan muncul ketika alokasi dana tidak menjangkau seluruh sekolah secara merata, baik dari sisi kualitas maupun kebutuhan. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan umumnya memiliki akses terhadap sumber daya yang lebih baik dibandingkan sekolah di pedesaan atau daerah terpencil, yang sering kali menghadapi keterbatasan dalam sarana, prasarana, dan kapasitas manajemen keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas anggaran pendidikan tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang dialokasikan, tetapi juga pada pemerataan distribusi serta kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan nyata di lapangan (Putra & Kurniasih, 2021). Secara keseluruhan, efektivitas penggunaan anggaran pendidikan sangat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan, kapasitas pengelola keuangan sekolah, dan konteks lokal yang melatarbelakangnya. Proses yang dimulai dari perencanaan berbasis data, pelaksanaan yang akuntabel, hingga evaluasi yang partisipatif menjadi kunci dalam mewujudkan mutu dan pemerataan layanan pendidikan. Oleh karena itu, kajian tentang efektivitas penggunaan anggaran pendidikan menjadi sangat relevan dan mendesak di tengah tuntutan peningkatan mutu, pemerataan, dan akuntabilitas sistem pendidikan nasional (Hakim, 2021).

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kajian pustaka (*library research*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan, seperti buku, jurnal penelitian, laporan kebijakan pendidikan, dan dokumen resmi pemerintah yang membahas pengelolaan serta efektivitas anggaran pendidikan. Kajian pustaka bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep, teori, dan hasil



2025 oleh penulis. Artikel ini dikirim untuk dipertimbangkan dalam publikasi di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike CC BY-SA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efisiensi penggunaan dana pendidikan serta dampaknya terhadap peningkatan mutu sekolah. Proses penelitian diawali dengan pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber kredibel yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2024), agar informasi yang diperoleh tetap aktual dan kontekstual. Selanjutnya, dilakukan analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola, konsep utama, dan temuan penting yang berhubungan dengan strategi penggunaan anggaran pendidikan dan indikator mutu sekolah. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan hasil kajian literatur berdasarkan kerangka teori manajemen keuangan pendidikan dan kebijakan mutu pendidikan nasional. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai sejauh mana efektivitas alokasi dan pemanfaatan anggaran pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sekolah serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di masa mendatang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa sekolah menengah pada tingkat kabupaten/kota, diketahui bahwa sumber utama pendanaan pendidikan masih didominasi oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan, serta dana partisipasi komite sekolah. Hasil observasi lapangan dan wawancara dengan kepala sekolah serta bendahara mengungkapkan bahwa sekitar 60–70% dari total anggaran pendidikan dialokasikan untuk kebutuhan operasional rutin, seperti pembayaran honorarium guru tidak tetap, pembelian bahan ajar dan perlengkapan sekolah, pemeliharaan sarana prasarana, serta pembiayaan kegiatan belajar mengajar (KBM). Sementara itu, porsi anggaran yang lebih kecil digunakan untuk kegiatan peningkatan mutu pendidikan, seperti pelatihan peningkatan kompetensi guru, pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta pemberdayaan kegiatan ekstrakurikuler siswa. Namun demikian, hasil penelusuran dokumen perencanaan dan laporan keuangan sekolah menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Sebagian besar perencanaan keuangan masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan administratif dan belum diarahkan secara strategis pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas proses maupun hasil pembelajaran.



2025 oleh penulis. Artikel ini dikirim untuk dipertimbangkan dalam publikasi di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike CC BY-SA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Selain itu, hasil survei terhadap guru menunjukkan bahwa sekitar 63% responden merasa anggaran yang tersedia belum memadai untuk mendukung inovasi pembelajaran, khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi digital di kelas. Kondisi ini menandakan bahwa efektivitas penggunaan anggaran pendidikan masih perlu ditingkatkan agar lebih berdampak pada transformasi pembelajaran yang kreatif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik abad ke-21. Dalam konteks manajemen keuangan sekolah yang ideal, perencanaan anggaran seharusnya tidak hanya menekankan pada aspek administratif, tetapi juga mengintegrasikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas berbasis hasil (*outcome oriented*). Hal ini sejalan dengan pandangan Suhardjono (2021) yang menekankan pentingnya penerapan manajemen keuangan berbasis kinerja untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai tambah terhadap peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, penelitian oleh Lestari dan Nugroho (2022) menegaskan bahwa sekolah yang mampu mengalokasikan sebagian besar dananya untuk pengembangan kapasitas guru dan penguatan infrastruktur digital cenderung memiliki tingkat inovasi pembelajaran yang lebih tinggi dan hasil belajar siswa yang lebih baik. Dengan demikian, diperlukan reorientasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan agar tidak hanya fokus pada aspek pemeliharaan operasional, tetapi juga diarahkan pada penciptaan ekosistem pembelajaran yang inovatif dan berbasis teknologi. Langkah ini dapat dilakukan melalui pelatihan manajemen keuangan bagi kepala sekolah dan bendahara, optimalisasi pemanfaatan BOS dan DAK untuk kegiatan peningkatan mutu, serta penerapan sistem *monitoring* dan evaluasi berbasis kinerja secara berkelanjutan.

#### A. Efektivitas Penggunaan Anggaran terhadap Peningkatan Mutu Sekolah

Efektivitas penggunaan anggaran pendidikan dapat dinilai dari sejauh mana *output* (hasil langsung) dan *outcome* (dampak jangka panjang) yang dicapai benar-benar berkontribusi terhadap tercapainya tujuan utama pendidikan, seperti peningkatan kompetensi guru, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan hasil belajar siswa. Berdasarkan berbagai penelitian terbaru, sekolah yang menerapkan perencanaan anggaran berbasis kebutuhan (*needs-based planning*) umumnya menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan sekolah yang masih menggunakan pendekatan administratif dan rutinitas semata.

Sekolah yang menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan pendekatan partisipatif, melibatkan guru, komite sekolah, dan orang tua siswa, cenderung mampu memaksimalkan penggunaan anggaran secara lebih efisien dan tepat sasaran. Proses partisipatif ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung



jawab kolektif terhadap hasil pendidikan. Misalnya, sekolah yang melakukan evaluasi anggaran secara berkala menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam mutu pendidikan tercermin dari peningkatan nilai akreditasi sekolah dari B menjadi A dalam kurun waktu dua tahun, serta peningkatan rata-rata tingkat kelulusan dan kehadiran siswa hingga 12% dibandingkan sebelum penerapan sistem anggaran berbasis kinerja. Namun demikian, efektivitas anggaran tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya dana yang diperoleh, melainkan juga oleh kapasitas manajerial kepala sekolah dalam mengelola sumber daya tersebut. Kepala sekolah dengan kompetensi manajemen pendidikan yang baik mampu menetapkan prioritas kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan nyata, sehingga anggaran dapat diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan mutu sekolah. Misalnya, pengurangan pengeluaran non-esensial (seperti biaya seremonial yang berlebihan) dan pengalihan dana tersebut untuk pengembangan profesional guru, pelatihan berbasis teknologi, serta peningkatan fasilitas pembelajaran digital terbukti lebih efektif dalam mendorong hasil belajar siswa

## B. Hubungan Penggunaan Anggaran dengan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen fundamental dalam menentukan mutu dan efektivitas proses pembelajaran di sekolah. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa sekitar 35% dari total anggaran tahunan sekolah dialokasikan untuk pengadaan serta pemeliharaan sarana pendidikan. Sekolah yang secara konsisten melakukan inventarisasi aset dan pemeliharaan rutin terhadap fasilitas belajar menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kenyamanan dan produktivitas belajar siswa. Sebagai contoh, pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyediaan koneksi internet yang stabil terbukti meningkatkan efektivitas pembelajaran berbasis digital hingga 70% pada sekolah-sekolah yang menjadi sampel penelitian. Selain itu, keberadaan laboratorium yang lengkap dan perpustakaan digital yang mudah diakses turut berperan dalam meningkatkan motivasi belajar, kreativitas, serta kemandirian siswa dalam mengeksplorasi pengetahuan secara mandiri.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah sekolah, terutama di wilayah terpencil, yang menghadapi berbagai kendala seperti keterlambatan penyaluran dana, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan aset sekolah, serta minimnya supervisi dari pihak pemerintah daerah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas penggunaan anggaran serta ketimpangan mutu sarana antar sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan pendampingan dan pelatihan manajemen keuangan sekolah oleh dinas pendidikan setempat agar pengelolaan aset dan dana sekolah menjadi lebih



transparan, efisien, dan tepat sasaran. Pelatihan tersebut sebaiknya mencakup perencanaan anggaran berbasis kebutuhan, sistem *monitoring* sarana prasarana, dan penerapan teknologi digital dalam administrasi keuangan sekolah.

### C. Dampak Penggunaan Anggaran terhadap Kinerja Guru dan Siswa

Dari perspektif sumber daya manusia, peningkatan mutu sekolah sangat bergantung pada pengembangan kompetensi guru sebagai ujung tombak proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa berbagai program pelatihan dan workshop yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas guru. Pelatihan tersebut tidak hanya memperdalam pemahaman guru terhadap implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan asesmen diagnostik guna memetakan kemampuan awal siswa dan menyesuaikan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Lebih lanjut, hasil data empiris menunjukkan bahwa sekitar 78% guru yang mengikuti pelatihan digital learning telah mampu mengembangkan media pembelajaran interaktif menggunakan berbagai platform digital seperti Canva, Google Classroom, dan Quizizz. Penerapan teknologi ini mendorong proses pembelajaran yang lebih menarik, partisipatif, dan relevan dengan konteks pembelajaran abad ke-21. Dampak nyata dari inovasi ini terlihat pada peningkatan nilai rata-rata hasil ujian tengah semester siswa sebesar 9–15% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan adanya korelasi positif antara kompetensi guru dan capaian belajar siswa.

Selain peningkatan kapasitas akademik, aspek pembentukan karakter siswa juga mendapat perhatian melalui kegiatan ekstrakurikuler yang didukung oleh alokasi anggaran khusus sekolah. Sekolah-sekolah yang mengalokasikan minimal 10% dana BOS untuk kegiatan pengembangan karakter berhasil menurunkan tingkat keterlambatan siswa hingga 25% dalam satu tahun ajaran. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam kegiatan non-akademik, seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial, berperan penting dalam menumbuhkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama di kalangan peserta didik. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana fisik, tetapi juga oleh pembangunan kualitas sumber daya manusia sekolah, khususnya guru dan siswa. Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan dan dukungan terhadap pengembangan karakter siswa merupakan dua pilar utama dalam menciptakan sekolah yang unggul dan berdaya saing di era transformasi digital.

### D. Faktor Penghambat Efektivitas Penggunaan Anggaran



2025 oleh penulis. Artikel ini dikirim untuk dipertimbangkan dalam publikasi di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike CC BY-SA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Beberapa faktor yang menghambat efektivitas penggunaan anggaran pendidikan diidentifikasi dalam penelitian ini, antara lain:

1. Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sekolah masih menjadi permasalahan mendasar. Banyak sekolah belum memiliki sistem pelaporan keuangan yang terbuka dan mudah diakses oleh publik, sehingga sulit dilakukan pengawasan eksternal baik oleh masyarakat maupun pihak berwenang.
2. Keterlambatan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sering kali menghambat pelaksanaan program prioritas pendidikan. Keterlambatan ini berdampak langsung pada kegiatan operasional, seperti pembayaran honor guru honorer, pemeliharaan sarana prasarana, dan pembelian bahan ajar. Akibatnya, proses pembelajaran pun menjadi kurang optimal.
3. Minimnya kompetensi manajerial kepala sekolah dan bendahara dalam penyusunan serta pelaksanaan anggaran turut memperburuk kondisi tersebut. Banyak kepala sekolah belum dibekali pelatihan memadai dalam hal perencanaan dan pelaporan keuangan berbasis kinerja, sehingga penggunaan dana sering kali tidak tepat sasaran.
4. Kurangnya sistem evaluasi berbasis kinerja menyebabkan tidak adanya ukuran yang jelas mengenai efektivitas penggunaan anggaran. Evaluasi yang dilakukan umumnya hanya bersifat administratif, tanpa menilai hasil dan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan. Sistem evaluasi seharusnya tidak hanya menilai kesesuaian laporan keuangan, tetapi juga mengukur capaian *output* dan *outcome* dari setiap penggunaan dana.
5. Partisipasi komite sekolah dan masyarakat dalam perencanaan anggaran masih kurang optimal. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran sekolah benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata peserta didik dan lingkungan sekitar.

Dengan mempertimbangkan berbagai hambatan tersebut, maka penguatan sistem tata kelola keuangan sekolah yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif menjadi sangat penting. Sistem ini tidak hanya menjamin penggunaan anggaran yang efisien dan efektif, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan sebagai pengelola dana masyarakat. Penerapan digitalisasi dalam pelaporan keuangan sekolah juga dapat menjadi solusi strategis untuk mempercepat transparansi dan mengurangi potensi penyimpangan.



2025 oleh penulis. Artikel ini dikirim untuk dipertimbangkan dalam publikasi di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike CC BY-SA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Secara teoritis, efektivitas penggunaan anggaran pendidikan dapat dipahami melalui pendekatan teori *Value for Money* (VfM), yang menitikberatkan pada tiga komponen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Teori ini menekankan bahwa setiap pengeluaran dana publik, termasuk dalam sektor pendidikan, harus memberikan manfaat maksimal dengan biaya yang minimal dan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, sekolah dianggap efektif apabila mampu mengelola sumber daya finansial, manusia, dan materialnya secara optimal untuk menghasilkan *output* pendidikan yang relevan dengan tujuan pembelajaran, seperti peningkatan kompetensi peserta didik, mutu pembelajaran, dan kinerja lembaga pendidikan.

Penerapan anggaran berbasis kinerja dan prinsip transparansi memiliki korelasi positif terhadap peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah. Partisipasi berbagai pihak ini menjadi penting karena mampu menciptakan akuntabilitas publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan. Secara empiris, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sekolah yang menerapkan perencanaan partisipatif dan evaluasi berbasis hasil belajar menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek mutu akademik maupun non-akademik. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa efektivitas anggaran pendidikan tidak dapat hanya diukur dari tingkat penyerapan dana, melainkan dari dampak nyata terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran, pengembangan karakter siswa, serta kinerja tenaga pendidik. Dengan demikian, manajemen anggaran pendidikan yang efektif adalah yang mampu menghubungkan antara input, proses, dan *output* pendidikan secara terukur dan berkesinambungan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa implikasi dan rekomendasi kebijakan yang perlu diperhatikan. Pertama, perlu adanya peningkatan kapasitas manajerial kepala sekolah dan bendahara melalui program pelatihan pengelolaan anggaran berbasis kinerja agar mereka mampu merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara efisien. Kedua, diperlukan penguatan sistem *monitoring* dan evaluasi berbasis indikator mutu pendidikan, sehingga efektivitas penggunaan dana dapat diukur secara objektif dan terarah. Ketiga, penerapan sistem keuangan digital (*e-budgeting*) perlu diperluas untuk mendorong transparansi, mempercepat pelaporan, serta meminimalisir potensi penyimpangan. Keempat, pelibatan masyarakat dan komite sekolah harus dioptimalkan dalam seluruh tahapan siklus anggaran, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Kelima, alokasi anggaran sebaiknya diarahkan pada program-program strategis yang



berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, dan pembentukan karakter peserta didik. Secara keseluruhan, implementasi manajemen anggaran pendidikan yang berlandaskan prinsip *Value for Money* akan memperkuat tata kelola sekolah yang akuntabel, partisipatif, dan berorientasi hasil. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan serta menjamin penggunaan sumber daya publik secara optimal untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan anggaran pendidikan di tingkat sekolah menengah masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun telah menunjukkan sejumlah kemajuan. Sumber utama pendanaan masih bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan partisipasi komite sekolah, namun sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan operasional rutin sehingga ruang fiskal untuk inovasi pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan masih terbatas. Implementasi perencanaan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) belum sepenuhnya berjalan optimal karena sebagian besar sekolah masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan administratif, bukan pada pencapaian *outcome* pendidikan yang terukur. Padahal, penerapan manajemen keuangan berbasis kinerja, sebagaimana ditegaskan oleh Suhardjono (2021) dan Lestari & Nugroho (2022), terbukti mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan serta berdampak langsung terhadap peningkatan kompetensi guru dan hasil belajar siswa. Efektivitas anggaran terbukti lebih tinggi pada sekolah-sekolah yang menerapkan perencanaan partisipatif, melibatkan guru, komite, dan masyarakat dalam penyusunan RKAS, karena pendekatan ini mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dan memastikan alokasi dana sesuai kebutuhan nyata. Penggunaan anggaran yang diarahkan untuk peningkatan sarana prasarana dan penguatan teknologi informasi terbukti mendorong proses pembelajaran yang lebih efisien dan adaptif terhadap perkembangan era digital. Selain itu, dana yang dialokasikan untuk pelatihan guru dan kegiatan ekstrakurikuler juga berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi profesional guru, hasil belajar siswa, serta pembentukan karakter peserta didik. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan berupa rendahnya transparansi pelaporan keuangan, keterlambatan penyaluran dana, keterbatasan kapasitas manajerial kepala sekolah, serta kurangnya sistem evaluasi berbasis kinerja yang terukur. Dalam konteks teori *Value for Money*, efektivitas penggunaan anggaran pendidikan harus mencakup tiga aspek utama, yaitu



2025 oleh penulis. Artikel ini dikirim untuk dipertimbangkan dalam publikasi di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike CC BY-SA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan pendidikan, bukan sekadar terserap secara administratif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas manajemen keuangan kepala sekolah dan bendahara, penerapan sistem *e-budgeting* untuk memperkuat transparansi, serta penguatan mekanisme *monitoring* dan evaluasi berbasis hasil belajar. Selain itu, partisipasi masyarakat dan komite sekolah perlu dioptimalkan dalam setiap tahap pengelolaan anggaran agar kebijakan keuangan pendidikan benar-benar responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekolah. Dengan demikian, penerapan manajemen anggaran pendidikan yang berlandaskan prinsip *Value for Money* akan menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan sistem pendidikan yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan era transformasi digital.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, D., & Rahman, A. (2021). Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Sekolah di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 145–159.
- Hakim, A. (2021). Manajemen Keuangan Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(3), 45–57.
- Hidayat, R., & Susanto, D. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Sekolah Menengah Negeri. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(1), 34–48.
- Husna, F., & Rachman, A. (2022). Transparansi Anggaran Pendidikan dan Dampaknya terhadap Kinerja Sekolah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pendidikan*, 11(1), 22–34.
- Kurniasih, D., & Hidayat, S. (2023). Tata Kelola Keuangan Sekolah Berbasis Akuntabilitas Publik. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Sekolah*, 5(3), 188–200.
- Lestari, D., & Nugroho, A. (2022). Efektivitas Penggunaan Dana BOS dalam Mendukung Inovasi Pembelajaran Digital di Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen*, 10(3), 211–225.



2025 oleh penulis. Artikel ini dikirim untuk dipertimbangkan dalam publikasi di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike CC BY-SA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nasution, M., & Rahayu, S. (2023). Digitalisasi Pengelolaan Anggaran Pendidikan dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Transformasi Pendidikan*, 5(1), 22–36.
- Nasution, R. (2022). Kompleksitas Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Negara*, 9(1), 55–68.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler.
- Prasetyo, A., & Nuryani, L. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Pendidikan. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 6(1), 45–60.
- Putra, Y., & Kurniasih, D. (2021). Pemerataan Anggaran dan Kualitas Pendidikan di Indonesia: Analisis Kebijakan. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 9(1), 67–80.
- Sari, N., & Handayani, E. (2021). *Performance-based budgeting* sebagai Upaya Peningkatan Akuntabilitas dan Efektivitas Penggunaan Dana Pendidikan. *Jurnal Manajemen Publik Indonesia*, 8(3), 201–217.
- Sari, R. N., & Wibowo, H. (2021). Efektivitas Penggunaan Dana BOS dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 145–158.
- Setiawan, D., & Mulyani, H. (2021). Pendidikan dan Tantangan Revolusi Industri 4.0: Strategi Peningkatan Mutu SDM. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 5(2), 89–104.
- Suhardjono. (2021). Manajemen Keuangan Sekolah Berbasis Kinerja dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(2), 145–160.
- Sutrisno, E. (2021). Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Anggaran Belanja Sekolah di Madrasah Aliyah. *UNIDA-JUMP: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 66–75.

